



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 22687. Fax. (0756) 22725

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 570.1/ 01 /Kpts/DPMPTSP-PS/I/2022

TENTANG

PENUNJUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN (PPTK)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Tahun 2022 dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka perlu ditunjuk Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susun Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 143 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tanggal 30 Desember 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/23/Kpts-BPT/PS/2022 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendaharawan Pengeluaran, Penerima dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada masing- masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2022, pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini :

KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tersebut adalah :

1. Menyusun Rencana Kerja Pelaksanaan Kegiatan.
2. Menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
3. Membuat Bukti Pembayaran dan Bukti Pengeluaran Kas (BPK).
4. Menyerahkan Berita Acara Hasil Pelaksanaan Kegiatan pada Bupati.
5. Menyiapkan SPJ atas Pengeluaran Kas untuk disetujui oleh Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK SKPD.
6. Menyusun Laporan Kegiatan Fisik dan Keuangan untuk disampaikan kepada Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.

Jasa.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Anggaran Tahun 2022, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Pada tanggal : 4 Januari 2022

KEPALA DINAS
 DINAS PERENCANAAN, KECERDASAN
 DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT
 SATU PINTU
 BERISKHAN, S.
 Pembina (IV)
 NIP. 19720302 199

Pembina (IV/a)

NIP 19720302 199302 1 001

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Bapak Kepala Inspektorat Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Ibu Kepala BPKPAD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Sdr. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan.
6. Arsip

Lampiran : lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 570.1/ 01 /Kpts/DPMPTSP-PS/I/2022
 Tanggal : 4 Januari 2022
 Tentang : Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO	NAMA/NIP PANGKAT /GOL	JABATAN	JABATAN KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	KEGIATAN SEKRETARIAT NINA HARNENGSIH,SH NIP. 19770610 200003 2 002/ Penata Tk.I (III/d)	Analisis Kebijakan	PPTK	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub kegiatan a Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah ✓	PA
2	YULIANDA SUNDARI, S.Sos NIP.19800703 200701 2 003/ Penta TK I (III/d)	Kasubag Umum dan Kepengawain		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub kegiatan a Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN b Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan a. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ✓ Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub kegiatan a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik ✓ b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor ✓	
3	OCI OVELINA,S.KOM NIP.19960829 202012 2 011/ Penata Muda (III/a)	Fungsional Umum	PPTK	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor b Penyediaan Bahan Logistik Kantor c Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan e Fasilitas Kunjungan Tamu f Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD ✓	

	OCI OVELINA,S.KOM NIP.19960829 202012 2 011/ Penata Muda (III/a)	Fungsional Umum	PPTK		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub kegiatan a Pengadaan Mebel ✓ Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Sub kegiatan a Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan ✓	
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub kegiatan a Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ✓ Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sub kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub kegiatan a Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya ✓ b Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya ✓	KPA
4	ZULMIRA, SH.MM NIP. 19790808 201407 2 005 /Penata Muda TK I (III/b)	Kasi Fasilitas Penanaman Modal	PPTK	1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Penanaman Modal	KPA
5	ERMA, SH. MM NIP. 19720202 199203 2 009/ Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan	PPTK	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL penetapan pemberian fasilitas/insentive bidang penanaman modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	KPA
6	LIA JENNI HARPITA, SE.M.Si NIP.19850119 201101 2 025/ Penata (III/c)	Analisis Kebijakan	PPTK	1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Penanaman Modal	KPA
7	NINI BUSTAMAR,SE NIP.199770206 200902 2 004/ Penata (III/c)	Analisis Kebijakan	PPTK	1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	KPA

8	ZULKARNAINI,S.Sos.MS,i NIP.19671117 199303 1 008	Analisis Kebijakan	PPTK	1	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	KPA
9	LINA MARIANI,SH NIP. 19771003 200902 2 003 /Penata (III/c)	Analisis Kebijakan	PPTK	1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kab/Kota	KPA
10	THIA SRIHARMI,S.Sos. MM NIP.19871120 200604 2 002 Penata Muda TK I (III/b)	Analisis Kebijakan	PPTK	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	KPA
11	RAHMI YETTI IDROES, SE. MM PNIP. 19660819 199203 2 007 / Pembina (IV/a)	Analisis Kebijakan	PPTK	1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	KPA

